



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP TAHUN 2024



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. LKjIP ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Yang digambarkan dalam LKjIP tersebut adalah capaian realisasi fisik dan keuangan serta beberapa indikator kegiatan seperti *input*, *output*, dan *outcome*.

Dalam LKjIP ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta visi, misi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Pasal 4 bab II Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu aturan terkait lainnya adalah Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tabek Panjang,      Februari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**NOPRIYADI SYUKRI, ST**  
NIP. 19791108 200604 1 010

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	1
	B. Tugas dan Wewenang
	2
	C. Dasar Hukum
	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan
	Umum dan Penataan Ruang
	8
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
	15
	C. Anggaran Tahun 2024
	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
	18
	B. Hasil Pengukuran Kinerja
	19
	C. Analisis dan Capaian Kinerja
	19
	D. Realisasi Anggaran
	39
	E. Realisasi Pendapatan
	43
	F. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP Atas Review
	LKJiP Tahun 2023
	44
BAB IV	PENUTUP
	46
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 2	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	9
Tabel 3	Arah Kebijakan, Program dan Indikator Program	10
Tabel 4	Indikator Program serta Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	11
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	13
Tabel 6	Target Kinerja Tahun 2021-2026	14
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15
Tabel 8	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	15
Tabel 9	Anggaran Dan Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024	16
Tabel 10	Perubahan Anggaran Dan Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024	16
Tabel 11	Formulasi untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis	18
Tabel 12	Klasifikasi penilaian berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018	18
Tabel 13	Hasil Pengukuran Kinerja	19
Tabel 14	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 1)	19
Tabel 15	Program Dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target IKU Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun (%)	20
Tabel 16	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 2)	21
Tabel 17	Program Dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target IKU Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	22
Tabel 18	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 3)	27
Tabel 19	Program Dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target IKU Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Air Minum	28
Tabel 20	Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target IKU Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah	29

## Domestik

Tabel 21	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 4)	30
Tabel 22	Program Dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target IKU Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	30
Tabel 23	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 5)	34
Tabel 24	Program Dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target IKU Ketaatan Penataan Ruang Kawasan Yang Sesuai RTRW	34
Tabel 25	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	34
Tabel 26	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	36
Tabel 27	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	37
Tabel 28	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	38
Tabel 29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38
Tabel 30	Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun Anggaran 2024	40
Tabel 31	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	43
Tabel 32	Kondisi Alat Berat UPT Alat Berat dan Labor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	44
Tabel 33	Rekomendasi dan dan Tindaklanjut Evaluasi Inspektorat terhadap LKJiP Tahun 2023	45



## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota	5
Gambar 2	Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP)	21
Gambar 3	Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan	21
Gambar 4	Rekonstruksi Jalan Poskesri Nagari Durian Tinggi	26
Gambar 5	Pembangunan Jembatan Harau Kec. Harau	27
Gambar 6	Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jr. Lokuak Dama Nagari Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang	28
Gambar 7	Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK ) Nagari Andaleh Kec. Luak	29
Gambar 8	Normalisasi Sungai Gonang di Sei Antuan, Kecamatan Mungka	32
Gambar 9	Irigasi Lakuak Murai Nagari Bukik Sikumpa Kec. Luak	32
Gambar 10	Irigasi Batu Balah Nagari Bukit Sikumpa Kec.Lareh Sago Halaban	33
Gambar 11	Irigasi Banjar Ranah Nagari Pangkalan kec. Pangkalan Kotobaru	33
Gambar 12	Pekerjaan Drainase Jalan Lareh Ronah Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban	35
Gambar 13	Fasilitasi Uji Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Konstruksi	36
Gambar 14	Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	37
Gambar 15	Pekerjaan Drainase Jalan Lareh Ronah Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban	37

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden ini pasal 4 Bab II mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan akhir tahun yang harus disampaikan oleh setiap Instansi Pemerintah termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). LKjIP yang dibuatkan oleh Instansi Pemerintah bertujuan untuk:

1. Menampilkan dan melaporkan realisasi kinerja sampai akhir tahun berdasarkan target kinerja yang ditetapkan diawal tahun anggaran.
2. Menyampaikan penjelasan terhadap realisasi target kinerja serta dukungan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.
3. Menyampaikan perubahan target kinerja pada pertengahan tahun jika ada serta realisasinya.

## **B. Tugas dan Wewenang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah instansi pelaksana Pemerintah Daerah dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

### **1. Tugas Pokok**

Dinas mempunyai mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta



bidang pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

### **i. Kepala Dinas;**

### **ii. Sekretariat, terdiri dari :**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi program dan pelaporan.

### **iii. Bidang Bina Marga, terdiri dari:**

- a. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan evaluasi bina marga.
- b. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembangunan jalan dan jembatan.
- c. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi preservasi jalan jembatan.

### **iv. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :**

- a. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan evaluasi sumber daya air.

- b. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pelaksanaan sumber daya air.
- c. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

**v. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :**

- a. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan evaluasi cipta karya.
- b. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.
- c. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi tata bangunan.

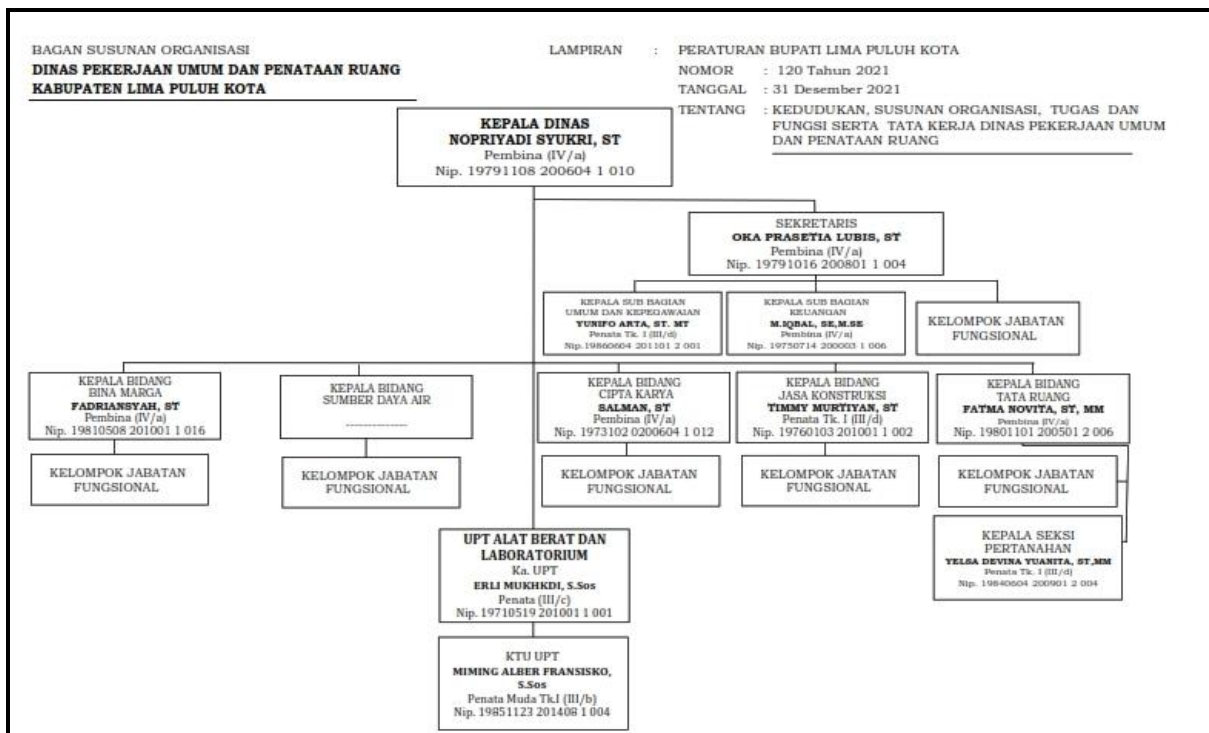
**vi. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:**

- a. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan jasa konstruksi.
- b. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembinaan dan pemberdayaan.
- c. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemantauan dan evaluasi.

**vii. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:**

- a. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan tata ruang.
- b. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemanfaatan dan pengendalian.
- c. Seksi Pertanahan.

**viii. UPT**



**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota**

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) orang, dimana terdiri dari 93 orang PNS, 2 orang PPPK, dan 52 orang Tenaga Kontrak. Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan**

Golongan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	S2	S1/D.IV	DIII	SMA Sederajat	SMP Sederajat	SD Sederajat	
IV	2	5	-	-	-	-	7
III	4	64	2	4	0	0	74
II	-	-	-	9	2	1	12
PPPK	-	2	-	-	-	-	2
TK	-	17	-	32	2	1	52
Total	6	88	2	45	4	2	147

### C. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan laporan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026 telah disusun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026 menampilkan Target Kinerja dan Pagu Indikatif selama 5 tahun yang dirinci pertahun.

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026 menampilkan hal sebagai berikut :



**Tabel 2**  
**Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Percepatan pembangunan gedung pemerintahan dan gedung strategis	1. Perbaikan Gedung Pemerintah yang mulai rusak 2. Pembangunan Gedung baru di IKK Sarilamak
	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis	1. Pemusatan Kantor Pemerintah di IKK Sarilamak 2. Pelestarian Gedung Bersejarah
Meningkatkan Kualitas Jalan	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan secara merata	Diprioritaskan pada ruas jalan kabupaten dan menjadi program unggulan
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Prioritas pada jalan yang terdapat genangan dan belum ada saluran drainasenya
	Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Pembinaan Lembaga dan tenaga terampil konstruksi	Mengadakan pelatihan terampil konstruksi dan memfasilitasi penyedia Sertifikat Terampil.
Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan penyediaan akses air minum layak dan aman.	Mengutamakan kawasan permukiman yang belum mendapatkan layanan air minum
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Percepatan pembangunan sarana sanitasi yang layak	Mengutamakan kawasan permukiman yang belum memiliki sarana sanitasi dan pengelolaan air limbah
	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pembangunan TPA/TPST/TPS
	Meningkatnya Pengembangan Permukiman	Peningkatan infrastruktur di kawasan permukiman	Peningkatan kualitas jalan dan sarana drainase di kawasan permukiman
Meningkatkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Penambahan kapasitas peningkatan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks resiko bendungan, peningkatan dan efisiensi kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.	1. Pemeliharaan dan peningkatan daerah irigasi supaya maksimal memenuhi areal cakupannya 2. Normalisasi dan pengamanan tebing sungai
Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Mewujudkan kesesuaian rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang	Kontrol dan Pengawasan yang kuat terdapat permohonan masyarakat dalam pemanfaatan ruang
	Meningkatnya Pengelolaan Izin Lokasi	Kemudahan dalam memberikan Rekomendasi Izin Lokasi Penanaman Modal	Prioritas untuk usaha di bidang pertanian dan perikanan
	Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Memfasilitasi proses pengadaan tanah	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sarana pemerintah
	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa	Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan	Prioritas memfasilitasi tanah pemerintah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Tanah Garapan		
	Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Memfasilitasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Prioritas memfasilitasi ganti rugi untuk pembangunan sarana umum dan pemerintah
	Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Memfasilitasi Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Prioritas memfasilitasi redistribusi tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dan sarana pemerintah
	Meningkatnya Penetapan Tanah Ulayat	Memfasilitasi Penetapan Tanah Ulayat	Prioritas tanah ulayat yang telah diakui dan dikukuhkan Masyarakat Hukum Adat
	Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Memfasilitasi Pengelolaan Tanah Kosong	Prioritas tanah kosong digunakan untuk kepentingan umum dan kegiatan untuk meningkatkan perekonomian
	Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Memfasilitasi Izin Membuka Tanah	Mengawal pemanfaatan tanah negara agar sesuai peruntukan
	Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Menata penggunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota	Mengontrol penggunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota

**Tabel 3**  
**Arah Kebijakan, Program dan Indikator Program**

Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	
		Uraian	Satuan
Perbaikan Gedung Pemerintah yang mulai rusak	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak	%
Diprioritaskan pada ruas jalan kabupaten dan menjadi program unggulan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%
Mengutamakan kawasan permukiman yang belum mendapatkan layanan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	%
Mengutamakan kawasan permukiman yang belum memiliki sarana santasi dan pengelolaan air limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	%
Pemeliharaan dan peningkatan daerah irigasi supaya maksimal memenuhi areal cakupannya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	%
Kontrol dan Pengawasan yang kuat terdapat permohonan masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%

**Tabel 4**  
**Indikator Program serta Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**

Indikator Program		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Uraian	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan	unit	12	3.145.000.000	18	30.820.000.000	25	31.744.000.000	32	32.696.000.000	39	33.677.000.000	46	34.688.000.000
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	km	614,58	150.000.000.000	628,23	154.690.000.000	645,85	159.379.000.000	660,17	164.069.000.000	676,47	169.033.000.000	691,33	174.104.000.000
Panjang saluran drainase primer yg terbangun	m	3680	6.368.520.000	4232	3.479.270.000	4866,8	5.262.400.000	5597	5.833.300.000	6436	6.273.960.000	7402	8.595.540.000
Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan	sertifikat	90	550.429.800	65	422.240.000	65	460.000.000	65	460.000.000	63	400.000.000	68	538.120.000
Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	%	100	100.000.000	100	125.000.000	100	390.310.000	100	390.310.000	100	461.210.000	100	566.210.000
Jumlah Rekomendasi IUJK Nasional yang diterbitkan		0	0	10	105.000.000	28	272.240.000	28	257.240.000	28	257.240.000	30	420.000.000
Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi	%	55	241.740.200	60	125.000.000	70	220.000.000	80	220.000.000	90	220.000.000	100	320.000.000
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih	rumah	340	7.000.000.000	440	9.000.000.000	450	9.270.000.000	460	9.548.000.000	460	9.834.000.000	460	10.129.000.000
Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	rumah	58.781	9.333.000.000	58.926	10.750.000.000	59.076	11.072.000.000	59.231	11.404.000.000	59.386	11.746.000.000	59.541	12.099.000.000
Jumlah sampah yang terkelola	ton	0	0	200	1.927.630.000	230	5.501.600.000	240	3.888.870.000		4.127.610.000		5.505.650.000
Jumlah Kawasan Permukiman yang telah dilengkapi infrastrukturnya		0	0	12	1.159.760.000	19	1.855.130.000	20	2.123.530.000	20	2.259.570.000	22	3.061.810.000
Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara	%	79	3.668.530.500	80,12	13.350.000.000	81,25	8.800.000.000	82,36	9.450.000.000	83,49	7.909.000.000	84,62	8.995.000.000
Persentase jaringan irigasi yang terkelola	%	80	31.863.735.600	80,60	39.600.000.000	81,22	45.738.000.000	81,84	46.724.000.000	82,46	49.950.000.000	83,08	50.600.000.000
Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan	dokumen	1	570.000.000	1	510.000.000	1	410.000.000	1	540.000.000	1	560.000.000	1	620.000.000
Jumlah perencanaan tata ruang yang telah ada	dokumen	1	100.000.000	3	400.000.000	6	560.000.000	8	490.000.000	11	520.000.000	14	540.000.000
Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai	lokasi	10	180.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	210.000.000	20	200.000.000
Jumlah pemanfaatan Ruang yang dapat dikendalikan	lokasi	10	149.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	110.000.000
Jumlah Izin Lokasi yang direkomendasikan		0	0		81.380.000		138.200.000		153.510.000		169.820.000		224.720.000
Terlaksananya Pengadaan Tanah	kapling	0	0	2	406.930.000	2	531.560.000	2	511.690.000	2	471.720.000	2	561.800.000
Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi	kasus	3	144.940.000	3	101.730.000	3	148.840.000	3	163.740.000	3	169.820.000	3	219.110.000

Indikator Program		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2021-2026)											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Uraian	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang difasilitasi		0	0	2	300.000.000	2	309.000.000	2	318.270.000	2	327.820.000	2	0
Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang difasilitasi			0	2	343.210.000	2	402.820.000	2	382.160.000	2	325.600.000	2	400.000.000
Jumlah Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang difasilitasi			0	2	80.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	165.000.000	2	184.270.000
Jumlah Tanah Ulayat yang ditetapkan yang difasilitasi			0	5	150.560.000	5	196.680.000	5	189.330.000	5	174.540.000	5	207.860.000
Persentase penyelesaian masalah tanah kosong			0	2	60.000.000	2	89.200.000	2	80.260.000	2	70.000.000	2	80.000.000
Persentase tanah kosong yang telah dimanfaatkan		0	0	2	123.120.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	142.280.000	2	172.810.000
Persentase izin yang diterbitkan		20	103.280.000	20	146.500.000	20	201.990.000	20	204.680.000	20	202.840.000	0	263.480.000
Jumlah penggunaan tanah yang difasilitasi	kapling	2	70.210.000	2	155.470.000	2	213.710.000	2	205.730.000	0	0	0	185.390.000
Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	160.804.000	100	257.804.000	100	242.000.000	100	283.000.000	100	290.000.000	100	315.000.000
Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	%	100	6.651.473.155	100	7.642.985.732	1000	8.024.985.019	100	8.434.884.270	100	8.863.628.483	100	9.314.209.907
Persentase terdatanya seluruh barang milik daerah	%	100	0	100	39.000.000	100	42.000.000	100	46.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000
Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100.000.000	100	120.000.000	100	350.000.000	100	175.000.000	100	450.000.000	100	225.000.000
Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	488.896.674	100	915.000.000	100	915.000.000	100	942.000.000	100	968.000.000	100	997.000.000
Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	71	0	74	2.625.000.000	76	3.440.000.000	78	244.000.000	80	4.087.000.000	82	266.000.000
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	738.840.000	100	810.000.000	100	846.200.000	100	879.400.000	100	912.600.000	100	954.800.000
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	62	807.556.000	65	2.330.000.000	68	2.590.000.000	70	2.680.000.000	72	3.177.000.000	75	3.362.000.000

**Tabel 5**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis		Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun (%)
		Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)
		Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)
2	Meningkatkan Kualitas Jalan		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten
		Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)
		Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)
3	Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat		Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)
		Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)
		Meningkatnya Pengembangan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)
4	Mengoptimalkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)
5	Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah		Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)
		Meningkatnya Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)
		Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Fasilitasi Pengadaan Tanah (%)
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)
		Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)
		Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)
		Meningkatnya Penetapan Tanah Ulayat	Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat (%)
		Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)
		Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)
		Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
7	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
			Indeks Reformasi Birokrasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**Tabel 6**  
**Target Kinerja Tahun 2021-2026 dalam Renstra**

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	68	71	75	77	80	85
Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah ditata (%)	50	55	60	65	70	75
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78
Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%)	42	44	46	48	50	52
Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%)	95	100	100	100	100	100
Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12
Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	78,45	80,05	81,65	83,35	85,05	86,85
Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)	0	5	20	30	40	50
Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%)	0	10	20	30	40	50
Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	77,52	78,32	79,12	79,92	80,72	81,52
Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	65	70	75	80	85	90
Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)	0	2	2	3	3	4
Persentase Fasilitasi Pengadaan Tanah (%)	0	2	2	2	2	2
Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	100	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	0	30	25	25	20	0
Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan (%)	0	20	20	20	20	20
Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat (%)	0	20	20	20	20	20
Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola (%)	0	20	20	20	20	20
Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi (%)	30	40	50	60	70	80
Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	20	20	20	20	0	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	78,05	78,50	78,92	79,45	79,85	80,5
Indeks Reformasi Birokrasi	24,14	26,14	28,24	30,34	32,44	34,54
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	0,742	0,762	0,782	0,802	0,822	0,842



## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun (%)	89,13%
2	Meningkatkan Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	59,95%
3	Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	86,42%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	83,35%
4	Mengoptimalkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	79,92%
5	Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	80%

Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun (%)	76,09%
2	Meningkatkan Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	59,95%
3	Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	82%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	66,50%
4	Mengoptimalkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	79,92%
5	Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	80%

Selanjutnya target Perubahan Perjanjian Kinerja inilah yang diukur dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

### C. Anggaran Tahun 2024

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPR tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Anggaran Dan Program Dinas Pekerjaan Umum**  
**Dan Penataan Ruang Tahun 2024**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	8.947.463.656
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.542.958.558
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	584.895.000
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.967.500.000
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.577.456.500
6	Program Penataan Bangunan Gedung	7.720.035.500
7	Program Penyelenggaraan Jalan	42.834.783.359
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	15.000.000
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	475.500.000
10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	170.000.000
11	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	5.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>71.840.592.573</b>

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas PUPR pada tahun 2024 yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPR Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 10**  
**Perubahan Anggaran Dan Program**  
**Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	9.587.004.234
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.542.958.558
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	584.895.000
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.967.500.000
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.577.456.500
6	Program Penataan Bangunan Gedung	7.720.035.500
7	Program Penyelenggaraan Jalan	42.984.783.359

NO	PROGRAM	ANGGARAN
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	15.000.000
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	475.500.000
10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	186.700.000
11	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	5.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>72.646.833.151</b>

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Capaian Target Kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi kinerja pada akhir tahun untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

**Tabel 11**  
**Formulasi untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Indikator Kinerja Utama	Formula / Dasar Perhitungan
Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun (%)	$\frac{\text{Jumlah Gedung Strategis Yang Terbangun}}{\text{Jumlah Total Gedung Strategis}} \times 100\%$
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$
Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan air bersih}}{\text{Total seluruh KK}} \times 100\%$
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan sarana sanitasi yang layak}}{\text{Total seluruh KK}} \times 100\%$
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{100\% Total Luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten}} \times 100\%$
Persentase ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$

Hasil pengukuran capaian kinerja ini dibandingkan dengan target kinerja untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan juga diuraikan secara jelas.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 12**  
**Klasifikasi penilaian berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

## B. Hasil Pengukuran Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 13**  
**Hasil Pengukuran Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun (%)	76,09%	76,09%	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	59,95%	60,14%	100,32%	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	82%	76,26%	93%	Sangat Tinggi
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	66,50%	67,75%	101,88%	Sangat Tinggi
4	Mengoptimalkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	79,92%	86,91%	108,75	Sangat Tinggi
5	Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	80%	78%	98%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					100,24%	Sangat Tinggi

## C. Analisis dan Capaian Kinerja

### 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis

Realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :

**Tabel 14**  
**Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 1)**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1	Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun (%)	89,13%	71,74%	71,74%	76,09%	76,09%	

Berdasarkan tabel di atas dapat diterangkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun pada tahun 2024 ditargetkan 76,09% dan terealisasi 76,09% karena ada penambahan pembangunan bangunan strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibangun yakni Kantor Dinas Pendidikan dan Mal Pelayanan Publik. Capaian target RPJMD tidak sesuai dengan target, karena keterbatasan anggaran untuk membangun Gedung strategis dari tahun 2022-2024, baru 2 Gedung yang terbangun yakni Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan dan Mal Pelayanan Publik.

Jumlah gedung strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah 46 unit dimana baru 33 Unit yang berada dalam Kawasan Ibukota Kabupaten. Dengan adanya 2 unit pembangunan gedung strategis yang berada di Kawasan IKK Sarilamak maka target capaian persentase gedung strategis yang terbangun menjadi 76,09%.

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target IKU ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 15**  
**Program Dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target IKU**  
**Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun (%)**

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Program Penataan Bangunan Gedung	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>7.720.035.500</b>	<b>6.385.346.483</b>	<b>1.334.689.017</b>	<b>82,71</b>
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.600.000.000	6.268.221.483	15.000.000	82,84
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	120.035.500	117.125.000	169.591.000	97,58

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program penataan bangunan gedung masih 82,71% untuk tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pembayaran keuangan pembangunan kantor dinas Pendidikan 76% dan rehab rumah dinas Kajari tidak terlaksana.







**Gambar 2**  
Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP)



**Gambar 3**  
Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan

## 2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas jalan

Realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :

**Tabel 16**  
**Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 2)**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	59,95%	58,65%	59,57%	59,95%	60,14%	

Berdasarkan tabel di atas dapat diterangkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2024 ditargetkan 59,95% dan terealisasi 60,14% atau berlebih 0,57%. Adapun Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah 618,37 km dan kondisi sedang adalah 43,85 km sehingga panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 662,22 km dari total panjang jalan kabupaten yaitu 1.101,20 km.

Capaian Target RPJMD dan IKU Dinas melebihi target tahun 2024 sebesar 0,19%. Walaupun sudah melebihi target, secara umum kondisi jalan

yang rusak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih panjang atau sekitar 39,86%. Untuk itu perlu ditingkatkan penganggaran yang lebih besar sehingga jalan di Kabupaten menjadi lebih baik. Target tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2024 melebihi target karena terpenuhinya target penanganan jalan kabupaten pada tahun 2024.

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target IKU ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 17**  
**Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target IKU**  
**Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap**

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	<b>Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>42.984.783.359</b>	<b>39.251.085.225</b>	<b>3.733.698.134</b>	<b>91,31</b>
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	540.000.000	517.336.400	22.663.600	95,80
		Rekonstruksi Jalan	25.910.722.491	24.849.059.126	1.061.663.365	95,90
		Pemeliharaan Berkala Jalan	4.618.346.000	4.601.892.587	16.453.413	99,64
		Pembangunan Jembatan	9.415.714.868	6.782.797.112	2.632.917.756	72,04
		Pemeliharaan Rutin Jalan	2.500.000.000	2.500.000.000	0	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi keuangan untuk program penyelenggaraan jalan masih 91,31% untuk tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya pekerjaan fisik yang tidak terlaksana yakni Jembatan Buluh Kasok karena waktu pengerjaan yang tidak cukup. Selain itu ada paket pekerjaan yang tidak selesai 100% yakni :

- a. Jembatan Lubuak Nago dengan Progres Fisik 72% dan pembayaran keuangan 57,50%.
- b. Jembatan Gantung Peranap dengan Progres Fisik 93% dan pembayaran keuangan 80,75%.
- c. Rekonstruksi Jalan Paket 1 DBH Sawit 2023 dengan Proges Fisik 93% dan pembayaran keuangan 61,25%.

Untuk ketiga paket pekerjaan fisik tersebut diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 hari kalender dengan denda.

Jalan kabupaten yang telah direkonstruksi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Rekonstruksi Jalan Paket 1
  - Bukik Kambuik - Banda Raik (R-102)

- Sp. Anding - Maek (R-29)
- Dandung Dandung - Limbanang (R-136)
- Simp. Sei. Mangkirai - Sei. Mangkirai (R-106)
- Sei. Antuan - Lubuak Simato (R-193)
- b. Rekonstruksi Jalan Paket 2
  - Bukik Sikumpa - Padang Belimbing (R-66 / R-170)
  - Halaban - Simp. Tembok (R-220)
- c. Rekonstruksi Jalan DBH Sawit 2023-2024
  - Rekonstruksi Jalan Paket 2 DBH Sawit 2023
  - Rekonstruksi Jalan DBH Sawit 2024
- d. Rekonstruksi Jalan DBH Sawit 2023
  - Rekonstruksi Jalan Paket 1 DBH Sawit 2023
- e. Jalan Baruah Gunuang 2 - Kubu Baru
- f. Jalan Belakang SMP 1 Harau
- g. Jalan Bondar Lintang Koto Tinggi 2 Ke Koto Tinggi 1 Maek
- h. Jalan Dari Jembatan - Simun II Jr. Manganti Nag. Jopang Manganti
- i. Jalan Ibu Nagari Batu Bolang
- j. Jalan Jorong Koto Tuo Nagari Mungka
- k. Jalan Jorong Labuah Lintang Nagari Sungai Antuan
- l. Jalan Jorong Padang Harapan Nagari Mungka
- m. Jalan Jorong Padang Koto Tuo Nagari Mungka
- n. Jalan Jorong Pematang Aur Nagari Sungai Naniang
- o. Jalan Kabupaten Menuju Pasar Baru
- p. Jalan Kaludan Sungai Tolang
- q. Jalan Kampuang Padang – Lokuang
- r. Jalan Ke Kampung Rambai Dari Surau Bendang
- s. Jalan Ke Kantor Camat Mungka
- t. Jalan Ke SDN 04 / Jalan Manjato II
- u. Jalan Koto Baru - Jembatan Siti Manggopoh
- v. Jalan Koto Marapak - Pandam Gadang
- w. Jalan Koto Tinggi 3 Nagari Maek
- x. Jalan Koto Tuo Menunju Kantor Wali Koto Tuo
- y. Jalan Manggi - Kociak Nag. Situjuah Gadang
- z. Jalan Melati Sanjai Anduang Sarilamak
- å. Jalan Moka Nagari Sariak Laweh
- ä. Jalan Mushalla Al Ikhsan Jr. Tabiang
- ö. Jalan Padang Ambacang Muaro

- aa. Jalan Padang Koli Koto Nagori Simalanggang
- bb. Jalan Padang Porongan - Pandam Gadang
- cc. Jalan Paralayang Nagari Taeh Bukik
- dd. Jalan Parik Dalam Mingkudu Menuju Pemukiman
- ee. Jalan Parobek – Boncah
- ff. Jalan Pemukiman Kampuang Melayu Indobaleh Barat
- gg. Jalan Pemukiman Taman Yudha Mas Kandang Lamo
- hh. Jalan Poskesri Nagari Durian Tinggi
- ii. Jalan Ronah Koto Marapak
- jj. Jalan Samping Lapangan Bola Ke Kampung Dalam
- kk. Jalan Samping Lapangan Bola Koto Baru
- ll. Jalan SD 05 Sarilamak Jorong Purwajaya
- mm. Jalan SDN 06 Jr. Tanjuang Kaliang
- nn. Jalan Sepakat Purwajaya
- oo. Jalan Siapi Api
- pp. Jalan Simp. Subarang Tabek - Subarang Tabek
- qq. Jalan Simpang 4 - Mushala Darul Haq
- rr. Jalan Simpang 4 - Padang Apa
- ss. Jalan Simpang Burai Mungka
- tt. Jalan Simpang Chaniago - Labuah Ketek
- uu. Jalan Simpang Cirondang
- vv. Jalan Simpang Jambak
- ww. Jalan Simpang Nugo Mungka
- xx. Jalan Simpang Tigo Talago – Kuaro
- yy. Jalan Surya Jorong Purwajaya
- zz. Jalan Tanjuang – Kapoan
- åå. Jalan Tanjung Bungo - Luak Begak
- ää. Jalan Tuanku Lareh
- öö. Jalan Ujung Bukik - Batu Bulan Talang Maur
- aaa. Jalan Utama Jorong Purwajaya
- bbb. Jalan Wisata Jorong Ateh Sungai Balantiak
- ccc. Jalang Anduring Ampang Godang VII Koto Talago
- ddd. Jln Boncah Tolang – Muaro
- eee. Jorong Koto Tinggi Alai Baru
- fff. Kubu Botuang - Kubu Padang
- ggg. Jalan Bukik Singok
- hhh. Pembukaan Jalan Bukik Suluah

- iii. Pembukaan Jalan Jrg Koto Tuo – Lolo
- jjj. Pembukaan Jalan Jrg Tanjung Bungo Ke Sumber Air Bersih
- kkk. Pembukaan Jalan Ke Bukit Pandan
- lll. Pembukaan Jalan Kubang Kociak - Pokan Lasa
- mmm. Pembukaan Jalan Perkuburan (TPU)
- nnn. Jalan Salo Lobuah Ke Sikumbang
- ooo. Pengerasan Jalan Batu Baraguang – Rosom
- ppp. Ruas Jalan Mungu – Sukaladi
- qqq. Jalan Simpang Tugu Situjuh Batur – Lakuang
- rrr. Jalan Simpang Amanah Tabek Panjang
- sss. Jalan Aur Duri Guguak Nunang Jorong Sei. Cubadak Nagari Piladang
- ttt. Jalan Simp. Mesjid Jamik Batu Hampa
- uuu. Jalan Taratak Padang Rajo Tj. Pati Nagari Koto Tuo
- vvv. Jalan Topang - Mushalla Nurul Iman
- cccc. Jalan Padang Dalam - Koto Baru

Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Rehab Berkala jalan
  - Balai Rupih - Sp. Tambun Ijuk
  - Bukik Apik - Simp. Kuranji (R-09)
  - Sarilamak - Akabarayun (R-48)
- b. Jalan Jorong Talaweh Nagari Mungo Kecamatan Luhak
- c. Jalan Kabupaten Pekan Sabtu-Mungo (R-211)
- d. Jalan Padang Kandih – Sipingai
- e. Jalan Padang Loweh - Kampung Tengah
- f. Jalan Ruas Piobang - Sungai Beringin
- g. Ruas Koto Baru - Bukik Apik
- h. Simp. Pulutan - Padang Barangan
- i. Simp. Kapuak - Taeh Bukik (R-231)
- j. Simpang Batu Labi-Batu Labi (R-155)
- k. Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27)

Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan Rutin Jalan Secara Swakelola

Pembangunan Jembatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Jembatan Harau
- b. Jembatan Gantung Peranap
- c. Jembatan Lubuak Nago (DBH Sawit 2024)

- d. Jembatan Bukik Runciang
- e. Jembatan Koto Tangah Galugua
- f. Jembatan Nenan
- g. Jembatan Tumpuan



**Gambar 4**  
Rekonstruksi Jalan Poskesri Nagari Durian Tinggi





**Gambar 5**  
Pembangunan Jembatan Harau Kec. Harau

### 3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat.

Realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :

**Tabel 18**  
**Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 3)**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	86,42%	81,50%	81,70%	82%	76,26%*	
2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83,35%	66,40%	66,47%	66,5%	67,75%*	

Berdasarkan tabel di atas dapat diterangkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten pada tahun 2024 ditargetkan 82% dan terealisasi 76,26% atau kurang 5,74% dari target. Dibandingkan dengan target RPJMD, juga tidak mencapai target karena masih kurang 10,16%. Hal ini disebabkan karena masih kurang nya anggaran untuk pemenuhan target indikator dan penambahan jumlah penduduk dan rumah tangga lebih besar dari penambahan jaringan sambungan rumah. Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target IKU ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 19**  
**Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target IKU**  
**Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Air Minum**

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>584.895.000</b>	<b>551.745.100</b>	<b>33.149.900</b>	<b>94,33</b>
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	584.895.000	551.745.100	33.149.900	94,33

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

- Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jr. Kapalo Koto Nagari Durian Gadang sebanyak 3 SR.
- Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jr. Lokuak Dama Nagari Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang sebanyak 5 SR.



**Gambar 6**  
**Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jr. Lokuak Dama Nagari Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang**

- b. Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak pada tahun 2024 ditargetkan 66,50% dan terealisasi 67,75% atau melebihi target sebesar 1,25%. Untuk capaian target RPJMD yakni 83,35% tidak mencapai target karena kurang sebanyak 15,6%. Tidak tercapainya target persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak pada tahun 2024 disebabkan masih kurang nya anggaran untuk pemenuhan

target indikator dan penambahan jumlah penduduk dan rumah tangga lebih besar dari penambahan pembangunan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat.

**Tabel 20**  
**Program dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target IKU**  
**Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik**

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.967.500.000</b>	<b>558.617.558</b>	<b>3.408.882.442</b>	<b>14,08</b>
		Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.967.500.000	558.617.558	3.408.882.442	14,08

Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan karena tidak terealisasinya pengadaan tanah untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang di anggarkan sebesar Rp.3.475.000.000,-. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air pada tahun 2024 yang terlaksana adalah Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK ) Nagari Andaleh Kec. Luak sebanyak 2 Unit untuk 12 KK.



#### **4. Sasaran Strategis 4 : Mengoptimalkan Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada.**

Realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :



**Tabel 21**  
**Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 4)**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	79,92%	79,92%	88,09%	79,92%	86,91%	

Tingkat capaian indikator kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2024 ditargetkan 79,92% untuk RPJMD dan IKU Dinas dan terealisasi 86,91% melebihi target sebesar 6,99%. Walaupun sudah mencapai target tapi jika dilihat dari kondisi jaringan Irigasi yang baik adalah 169 DI dari total 370 DI atau 45,68%. Dilihat dari Luas Area (ha), baru 11.234 ha dalam kondisi baik dari 22.803 ha atau 49,27%. Untuk itu perlu peningkatan anggaran di tahun berikutnya sehingga kondisi Daerah Irigasi di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi lebih baik lagi.

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target IKU ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 22**  
**Program Dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target IKU Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi**

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>951.799.950</b>	<b>920.624.250</b>	<b>31.175.700</b>	<b>96,72</b>
		Normalisasi/Restorasi Sungai	548.211.950	547.650.450	561.500	99,90
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	187.500.000	187.044.000	456.000	99,76
		Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	216.088.000	185.929.800	30.158.200	86,04
		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.591.158.608</b>	<b>4.530.984.391</b>	<b>60.174.217</b>	<b>98,69</b>
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.223.438.050	1.216.804.524	6.633.526	99,46
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.100.103.458	2.056.742.743	43.360.715	97,94
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	961.913.000	954.347.225	7.565.775	99,21
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	305.704.100	303.089.899	2.614.201	99,14

Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya pada tahun 2024 adalah Pembangunan Embung Lurah Situak Nagari Mungo.

Normalisasi/Restorasi Sungai pada tahun 2024, diantaranya sebagai berikut:

- a. Normalisasi Sungai Balai Tampuak Pinang Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka
- b. Normalisasi Sungai Batang Kapur
- c. Normalisasi Sungai Gonang Sei Antuan
- d. Normalisasi Sungai Simpang Limau Durian Tinggi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Batu Deta
- b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Banda Gosan
- c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Bdr Kaludan
- d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Kapalo Banda
- e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Banja Ranah
- f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Ujung Bukit
- g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Irigasi Batu Nan Balah
- h. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Irigasi Tali Bandar Sialang
- i. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Lanjutan D.I Aur Duri
- j. Pemeliharaan Irigasi Ampang Baromban Nagari Suayan
- k. Rehabilitasi Jaringan Permukaan Di Kurungan Balai Ganang Mungo

Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

- a. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Irigasi Lakuak Murai
- b. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Irigasi Sawah Bakuang (Lanjutan)
- c. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Irigasi Sawah Tiga Alur
- d. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Irigasi tali bandar guguk 1
- e. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Lanjutan Pembangunan Irigasi Banda Tabiang di Jorong Tabiang
- f. Pemasangan batu bonjong irigasi Ampang Gadang
- g. Pemasangan batu saluran irigasi Jorong dalam Koto Taeh Baruah
- h. Pembangunan Irigasi Bonda Sabalik Padang Tunggang - Padang Tarok Nagari Harau
- i. Pembangunan Irigasi di Jorong Madang Kadok
- j. Pembangunan Saluran Irigasi di Jorong Rageh
- k. Pembangunan Saluran Irigasi di Jorong Subaladuang

1. Pembangunan Saluran Irigasi Lokuak Sipeleang di Jorong Batang Tabik
- m. Pembuatan Irigasi belakang Surau Banja nagari Piobang
- n. Peningkatan jaringan Irigasi Jrg Topi Nagari Situjuah Batua
- o. Rehabilitasi Irigasi D.I. Bandar Panjang
- p. Rehabilitasi Irigasi D.I. Taratak



**Gambar 8**  
Normalisasi Sungai Gonang di Sei Antuan, Kecamatan Mungka



**Gambar 9**  
Irigasi Lakuak Murai Nagari Bukik Sikumpa Kec. Luak





**Gambar 10**

Irigasi Batu Balah Nagari Bukit Sikumpa Kec.Lareh Sago Halaban



**Gambar 11**

Irigasi Banjar Ranah Nagari Pangkalan kec. Pangkalan Kotobaru

## 5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah

Realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :

**Tabel 23**  
**Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja (Sasaran Strategis 5)**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
1	Persentase ketaatan terhadap RTRW	80%	75%	75%	80%	80,6%	

Berdasarkan tabel di atas dapat diterangkan bahwa tingkat capaian Target RPJMD dan kinerja Dinas indikator Persentase ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2024 ditargetkan 80% dan terealisasi 80,6% atau berlebih 0,6%. Adapun hal ini diukur dari jumlah surat informasi ruang yang sesuai dengan pola ruang tahun 2024 sebanyak 54 dibandingkan dengan surat informasi ruang yang dikeluarkan sepanjang tahun 2024 sebanyak 67.

Program dan Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian Target IKU ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 24**  
**Program Dan Kegiatan Utama Untuk Mendukung Pencapaian Target IKU Ketaatan Penataan Ruang Kawasan Yang Sesuai RTRW**

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota</b>	<b>465.500.000</b>	<b>464.750.807</b>	<b>749.193</b>	<b>99,84%</b>
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	465.500.000	464.750.807	749.193	99,84%
		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.930.500</b>	<b>69.500</b>	<b>99,31%</b>
		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	10.000.000	9.930.500	69.500	99,31%

## 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Indikator capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase adalah Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik dengan target tahun 2024 adalah 48% dengan capaian kinerja 48%. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 25**  
**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.577.456.500</b>	<b>1.539.928.300</b>	<b>37.528.200</b>	<b>97,62</b>



No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.577.456.500	1.539.928.300	37.528.200	97,62

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan pada tahun 2024 diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Drainase Dekat Kantor Wali Nagari Sungai Talang
- b. Drainase jalan ke SD Negeri 01 Sialang
- c. Drainase jalan sawah liek-soriak
- d. Drainase Pasar Baru
- e. Lanjungan Pembangunan Drainase dibelakang Mesjid AL-Muhsinin
- f. Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Nagari Koto Tangah Simalanggang
- g. Pemasangan batu atau coran untuk drainase Pemukiman Tanjung Anau Indobaleh Timur
- h. Pembangunan Drainase jalan Lareh Ronah-Batu payung
- i. Pembangunan Drainase jalan Pakan Rabaa-Balai Panjang
- j. Pembangunan Drainase jalan Pakan Sinayan-Pakan Rabaa
- k. Pembangunan Drainase Jalan Rageh - Madang Kadok
- l. Pembangunan Drainase Jalan Raya Taeh Mungka
- m. Pembangunan Drainase Jalan Talang Anau
- n. Pembangunan Drainase Jorong Lubuak Koto Sialang Nagari Sialang
- o. Pembangunan Drainase Kampung KB Nagari Sialang
- p. Pembangunan Drainase Simpang Yenita – Subaladuang
- q. Pembangunan Drinase Jr. Padang Jopang Nag. VII Koto Talago
- r. Pembuatan drainase dikandang lamo sarilamak pemukiman taman yudha mas.



**Gambar 12**

Pekerjaan Drainase Jalan Lareh Ronah Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban

## 7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Indikator capaian program pengembangan jasa konstruksi adalah Persentase Lembaga Konstruksi yang Terbina dengan target tahun 2024 adalah 100% dengan capaian kinerja 90%. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 26**  
**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.495.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>84,95</b>
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	5.000.000	5.000.000	0	100
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	5.000.000	3.495.000	1.505.000	69,90
		<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	0	100



**Gambar 13**

Fasilitasi Uji Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Konstruksi



**Gambar 14**

Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

## 8. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Indikator capaian program penyelesaian sengketa tanah garapan adalah Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan dengan target tahun 2024 adalah 100% dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 27**

**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>186.700.000</b>	<b>186.127.800</b>	<b>572.200</b>	<b>99,69</b>
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	186.700.000	186.127.800	572.200	99,69



**Gambar 15**

Pekerjaan Drainase Jalan Lareh Ronah Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban



## 9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Indikator capaian program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan adalah Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dengan target tahun 2024 adalah 25% dengan capaian kinerja 0%, karena tidak ada ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 28**  
**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan Tanah Untuk Pembangunan	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.977.500</b>	<b>22.500</b>	<b>99,55</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.977.500	22.500	99,55

## 10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota adalah Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target tahun 2024 adalah 100% dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 29**  
**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.779.000</b>	<b>221.000</b>	<b>97,79</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.919.000	81.000	98,38
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.860.000	140.000	97,20
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.020.110.734</b>	<b>8.819.760.251</b>	<b>200.350.483</b>	<b>97,78</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.020.110.734	8.819.760.251	200.350.483	97,78
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>84.056.250</b>	<b>83.665.653</b>	<b>390.597</b>	<b>99,54</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	3.000.000	3.000.000	0	100,00

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
		Kantor				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.700.000	1.700.000	0	100,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.856.250	20.856.000	250	100,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	0	100,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.500.000	10.200.000	300.000	97,14
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.000.000	22.980.000	20.000	99,91
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	19.929.653	70.347	99,65
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>68.200.000</b>	<b>68.188.742</b>	<b>11.258</b>	<b>99,98</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000	64.988.742	11.258	99,98
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.200.000	3.200.000	0	100,00
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>404.637.250</b>	<b>350.400.250</b>	<b>54.237.000</b>	<b>86,60</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000	51.820.250	3.179.750	94,22
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	346.022.250	295.740.000	50.282.250	85,47
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.615.000	2.840.000	775.000	78,56

#### D. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 adalah sebesar **Rp.72.646.833.151,-** yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan. Jumlah program sebanyak 11 program, 18 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Sampai akhir Desember 2024, capaian kinerja kegiatan secara fisik mencapai 91,52 %, karena ada beberapa kegiatan fisik yang tidak terlaksana dan tidak tuntas 100% dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.63.749.406.810,-** atau 87,75%.

Adapun realisasi anggaran tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

**Tabel 30**  
**Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun Anggaran 2024**

No. Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
<b>01.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.587.004.234</b>	<b>9.331.793.896</b>	<b>255.210.338</b>	<b>97,34</b>	<b>Efisien</b>
<b>1.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.779.000</b>	<b>221.000</b>	<b>97,79</b>	<b>Efisien</b>
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.919.000	81.000	98,38	Efisien
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.860.000	140.000	97,20	Efisien
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.020.110.734</b>	<b>8.819.760.251</b>	<b>200.350.483</b>	<b>97,78</b>	<b>Efisien</b>
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.020.110.734	8.819.760.251	200.350.483	97,78	Efisien
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>84.056.250</b>	<b>83.665.653</b>	<b>390.597</b>	<b>99,54</b>	<b>Efisien</b>
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	0	100,00	Efisien
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.700.000	1.700.000	0	100,00	Efisien
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.856.250	20.856.000	250	100,00	Efisien
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	0	100,00	Efisien
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.500.000	10.200.000	300.000	97,14	Efisien
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.000.000	22.980.000	20.000	99,91	Efisien
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	19.929.653	70.347	99,65	Efisien
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>68.200.000</b>	<b>68.188.742</b>	<b>11.258</b>	<b>99,98</b>	<b>Efisien</b>
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000	64.988.742	11.258	99,98	Efisien
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.200.000	3.200.000	0	100,00	Efisien
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>404.637.250</b>	<b>350.400.250</b>	<b>54.237.000</b>	<b>86,60</b>	<b>Efisien</b>
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000	51.820.250	3.179.750	94,22	Efisien
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	346.022.250	295.740.000	50.282.250	85,47	Efisien
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.615.000	2.840.000	775.000	78,56	Tidak Efisien
<b>01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>5.542.958.558</b>	<b>5.451.608.641</b>	<b>91.349.917</b>	<b>98,35</b>	<b>Efisien</b>
<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>951.799.950</b>	<b>920.624.250</b>	<b>31.175.700</b>	<b>96,72</b>	<b>Efisien</b>
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	548.211.950	547.650.450	561.500	99,90	Efisien
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	187.500.000	187.044.000	456.000	99,76	Efisien
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	216.088.000	185.929.800	30.158.200	86,04	Efisien
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.591.158.608</b>	<b>4.530.984.391</b>	<b>60.174.217</b>	<b>98,69</b>	<b>Efisien</b>
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.223.438.050	1.216.804.524	6.633.526	99,46	Efisien

No. Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.100.103.458	2.056.742.743	43.360.715	97,94	Efisien
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	961.913.000	954.347.225	7.565.775	99,21	Efisien
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	305.704.100	303.089.899	2.614.201	99,14	Efisien
<b>01.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>584.895.000</b>	<b>551.745.100</b>	<b>33.149.900</b>	<b>94,33</b>	<b>Efisien</b>
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>584.895.000</b>	<b>551.745.100</b>	<b>33.149.900</b>	<b>94,33</b>	<b>Efisien</b>
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	584.895.000	551.745.100	33.149.900	94,33	Efisien
<b>01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>3.967.500.000</b>	<b>558.617.558</b>	<b>3.408.882.442</b>	<b>14,08</b>	<b>Tidak Efisien</b>
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.967.500.000</b>	<b>558.617.558</b>	<b>3.408.882.442</b>	<b>14,08</b>	<b>Tidak Efisien</b>
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	3.967.500.000	558.617.558	3.408.882.442	14,08	Tidak Efisien
<b>01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>1.577.456.500</b>	<b>1.539.928.300</b>	<b>37.528.200</b>	<b>97,62</b>	<b>Efisien</b>
<b>1.03.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.577.456.500</b>	<b>1.539.928.300</b>	<b>37.528.200</b>	<b>97,62</b>	<b>Efisien</b>
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.577.456.500	1.539.928.300	37.528.200	97,62	Efisien
<b>01.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>7.720.035.500</b>	<b>6.385.346.483</b>	<b>1.334.689.017</b>	<b>82,71</b>	<b>Efisien</b>
<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>7.720.035.500</b>	<b>6.385.346.483</b>	<b>1.334.689.017</b>	<b>82,71</b>	<b>Efisien</b>
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.600.000.000	6.268.221.483	1.331.778.517	82,48	Efisien
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	120.035.500	117.125.000	2.910.500	97,58	Efisien
<b>01.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>42.984.783.359</b>	<b>39.251.085.225</b>	<b>3.733.698.134</b>	<b>91,31</b>	<b>Efisien</b>
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>42.984.783.359</b>	<b>39.251.085.225</b>	<b>3.733.698.134</b>	<b>91,31</b>	<b>Efisien</b>
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	540.000.000	517.336.400	22.663.600	95,80	Efisien
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	25.910.722.491	24.849.059.126	1.061.663.365	95,90	Efisien
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.618.346.000	4.601.892.587	16.453.413	99,64	Efisien
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	9.415.714.868	6.782.797.112	2.632.917.756	72,04	Tidak Efisien
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.500.000.000	2.500.000.000	0	100,00	Efisien
<b>01.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>15.000.000</b>	<b>13.495.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>89,97</b>	<b>Efisien</b>

No. Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.03.11.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.495.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>84,95</b>	<b>Efisien</b>
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	5.000.000	5.000.000	0	100,00	Efisien
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	5.000.000	3.495.000	1.505.000	69,90	Tidak Efisien
<b>1.03.11.2.04</b>	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>Efisien</b>
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	0	100,00	Efisien
<b>01.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>475.500.000</b>	<b>474.681.307</b>	<b>818.693</b>	<b>99,83</b>	<b>Efisien</b>
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>465.500.000</b>	<b>464.750.807</b>	<b>749.193</b>	<b>99,84</b>	<b>Efisien</b>
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	465.500.000	464.750.807	749.193	99,84	Efisien
<b>1.03.12.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.930.500</b>	<b>69.500</b>	<b>99,31</b>	<b>Efisien</b>
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	10.000.000	9.930.500	69.500	99,31	Efisien
<b>02.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>186.700.000</b>	<b>186.127.800</b>	<b>572.200</b>	<b>99,69</b>	<b>Efisien</b>
<b>2.10.04.2.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>186.700.000</b>	<b>186.127.800</b>	<b>572.200</b>	<b>99,69</b>	<b>Efisien</b>
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	186.700.000	186.127.800	572.200	99,69	Efisien
<b>02.10.05</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.977.500</b>	<b>22.500</b>	<b>99,55</b>	<b>Efisien</b>
<b>2.10.05.2.01</b>	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.977.500</b>	<b>22.500</b>	<b>99,55</b>	<b>Efisien</b>
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.977.500	22.500	99,55	Efisien
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>72.646.833.151</b>	<b>63.749.406.810</b>	<b>8.897.426.341</b>	<b>87,75</b>	<b>Efisien</b>

Klasifikasi efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan :

1. Efisien bila persentase realisasi fisik  $\geq 80\%$
2. Tidak efisien bila persentase realisasi fisik  $< 80\%$

Analisis efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 100 % walaupun realisasi keuangan 97,34 %
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 100% walaupun realisasi keuangannya 98,35%.



3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 100% walaupun realisasi keuangannya 94,33%.
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, penggunaan anggarannya tidak efisien karena realisasi fisiknya 15,06% dan realisasi keuangannya 14,08%.
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 100% walaupun realisasi keuangannya 97,62%.
6. Program Penataan Bangunan Gedung, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 88,44% dan realisasi keuangannya 82,71%.
7. Program Penyelenggaraan Jalan, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 95,93% walaupun realisasi keuangannya 91,31%.
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 100% walaupun realisasi keuangannya 89,97%.
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 100% walaupun realisasi keuangannya 99,83%.
10. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 100% walaupun realisasi keuangannya 99,69%.
11. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, penggunaan anggarannya efisien karena realisasi fisiknya 100% walaupun realisasi keuangannya 99,55%.

#### **E. Realisasi Pendapatan**

Pada tahun 2024, Dinas PUPR diberi target pendapatan sebesar Rp.759.741.754,- dengan realisasi Rp.738.287.018,-. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 31**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024**

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>759.741.754</b>	<b>738.287.018</b>	<b>97,18</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	759.741.754	738.287.018	97,18
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	251.175.000	142.720.000	56,82
4.1.02.02.01	Retribusi PemakaianKekayaan Daerah	251.175.000	142.720.000	56,82
<b>4.1.02.02.01.0004</b>	<b>Retribusi PemakaianLaboratorium</b>	<b>22.800.000</b>	<b>69.020.000</b>	<b>302,72</b>
<b>4.1.02.02.01.0007</b>	<b>Retribusi PemakaianAlat</b>	<b>228.375.000</b>	<b>73.700.000</b>	<b>32,27</b>
4.1.02.03	Retribusi PerizinanTertentu	508.566.754	595.567.018	117,11
4.1.02.03.07	Retribusi PersetujuanBangunan Gedung	508.566.754	595.567.018	117,11

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	508.566.754	595.567.018	117,11

Dari 3 Sumber PAD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, yang tidak mencapai target adalah Retribusi Pemakaian Alat (32,27%).

Faktor penyebab target retribusi pemakaian alat tidak tercapai karena:

1. Alat berat yang ada di UPT Alat Berat dan labor semuanya berjumlah 10 Unit dengan kondisinya 6 Baik dan 4 Rusak.
2. Dari 6 alat berat dalam kondisi baik tersebut yang disewa hanya 4 alat yakni Tandem Roller, Baby Roller, Maintenance Unit dan excavator mini, sedangkan 2 alat lagi yang memiliki harga sewa yang tinggi yakni Excavator dan Motor Grader tidak ada yang menyewa.
3. Persaingan dengan pihak swasta yang semakin tinggi sehingga permintaan untuk pemakaian alat pada Dinas PUPR menjadi Rendah.

Berikut disampaikan kondisi alat berat pada UPT Alat Berat dan Labor Dinas PUPR Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024.

**Tabel 32**  
**Kondisi Alat Berat UPT Alat Berat dan Labor Dinas Pekerjaan Umum**  
**Dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024**

No	Jenis	Merk/type		Tahun	Sewa Perda No 2 2024	Satuan Hari	Kondisi	Permintaan	
		Peralatan	Mesin					Disewa	Tidak disewa
1	Tandem Roller	BARATA	MGB. 7	2008	400.000	Per Hari	Baik	√	
2	Excavator	HITACHI	ZAXIS 200	2001	1.400.000	Per Hari	Baik		√
3	Motor Greder	MITSUBISHI	MG. 330	1994	1.600.000	Per Hari	Baik		√
4	Road Roller (Mesin Gilas)	BARATA	MV.6P	1974	300.000	Per Hari	Rusak Ringan		√
5	Road Roller (Mesin Gilas)	BARATA	MG.6	1983	300.000	Per Hari	Rusak Berat		√
6	Excavator Mini	HYUNDAI	55-7	2011	800.000	Per Hari	Rusak Ringan		√
7	Baby Roller	SAKAI		2014	300.000	Per Hari	Baik	√	
8	Vibrator Roller	SAKAI	SW. 40	1982	350.000	Per Hari	Rusak Ringan		√
9	Maintenance Unit	HINO	FA. 142 KA	1989	375.000	Per Hari	Baik	√	
10	Excavator Mini	HITACHI	ZAXIS 65	2019	1.000.000	Per Hari	Baik	√	

## **F. Tindak Lanjut Rekomendasi Apip Atas Review LKJIP Tahun 2023**

Rekomendasi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabuapten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 33**  
**Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi Inspektorat terhadap LKJiP Tahun 2023**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Perencanaan Kinerja :</p> <p>a. Melakukan pemantauan Rencana Aksi setiap bulan yang dituangkan dalam notulen rapat meliputi pembahasan target, pembahasan hambatan dan kendala yang dihadapi, arahan pimpinan, dan rencana penyesuaian aktivitas.</p> <p>b. Melakukan pemantauan Rencana Aksi secara berjenjang dengan bukti berupa notulen rapat-rapat pembahasan di Bidang, Sub Bidang sampai level individu yang terdokumentasi dengan baik.</p>	Sudah ditindaklanjuti dengan Pemantauan dilaksanakan setiap triwulan dengan dibuktikan dengan ada laporan monitoring setiap triwulannya.
2	<p>Pengukuran Kinerja</p> <p>a. Memanfaatkan Pengukuran Kinerja dalam penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran;</p> <p>b. Melakukan sosialisasi tentang hasil pengukuran kinerja kepada seluruh Pegawai dan berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya</p>	Pengukuran kinerja dilakukan dengan penyampaian progres pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Sosialisasi progres pelaksanaan kegiatan ini kadang disampaikan pada saat apel Pagi oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid- Kabid.
3	<p>Pelaporan Kinerja</p> <p>a. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;</p> <p>b. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;</p> <p>c. Melakukan sosialisasi tentang informasi dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai agar dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi kearah yang lebih baik</p> <p>d. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</p>	Sudah dilaksanakan karena jika pencapaian kinerja tidak bisa di capai karena adanya berbagai kendala dilakukan perubahan PK, sehingga capaian kinerja dapat di capai.
4	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <p>a. Melaksanakan pemantauan Kinerja Internal dengan pendalaman yang memadai, meliputi pembahasan target kinerja secara berjenjang, hambatan, kendala dan pembahasan rencana penyesuaian aktivitas, stretegi serta kebijakan dan dilakukan rutin setiap bulan yang dituangkan dalam notulen atau laporan pemantauan.;</p> <p>b. Menggunakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja</p>	Sudah dilaksakan pemantauan internal dengan adanya laporan monitoring secara triwulan nya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah instansi pelaksana Pemerintah Daerah dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 11 (sebelas) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar **Rp.72.646.833.151,-**

Dari 11 program dengan 19 kegiatan dan 39 sub kegiatan tersebut, tercapai realisasi fisik sampai akhir Desember 2024 sebesar 91,52%, artinya ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana seperti pengadaan tanah IPLT, Jembatan Buluh Kasok dan Rehab rumah Dinas Kajari. Selain itu ada juga kegiatan yang belum 100% realisasi fisik nya seperti Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan, Jembatan Peranap, Jembatan Lubuak Nago dan Rekonstruksi Jalan Paket 1 DBH Sawit 2023. Realisasi keuangan sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar **Rp.63.749.406.810,-** atau sebesar 87,75% dari total alokasi belanja langsung. Sisa anggaran sebesar **Rp.8.897.426.341** atau sebesar **12,25%** yang menjadi SILPA.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024, semoga dapat menggambarkan Kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2024.

Tabek Panjang,      Februari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lima Puluh Kota



**NOPRIYADI SYUKRI, ST**  
NIP. 19791108 200604 1 010